

Global Citizenship Education : Urgensi PPKn dalam Mempersiapkan Warga Negara Global yang Berkarakter Pancasila

Eti Suliyawati^{1*}, Andhika Lungguh Perceka²

¹Prodi D3 keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan kebidanan, Institut Kesehatan Karsa Husada Garut, Jalan Nusa Indah Nomor 24, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

²Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, Institut Kesehatan Karsa Husada Garut, Jalan Nusa Indah Nomor 24, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat
hsuliyawati@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the urgency of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) in shaping the character of global citizens based on Pancasila values amidst increasingly intense globalization. The method used was a literature study, analyzing various relevant literature sources, such as books, scientific journals, and educational policy documents. The results indicate that PPKn plays a strategic role as a fundamental instrument in balancing mastery of global competencies with strengthening national identity. PPKn learning not only equips students with knowledge of their rights and obligations as citizens but also instills critical awareness of global issues such as social inequality, conflict, and environmental damage. The values of Pancasila, particularly the principles of just and civilized humanity and social justice, serve as an ethical foundation for addressing global challenges to ensure the nation's identity is not lost. PPKn encourages the creation of adaptive, tolerant, and solution-oriented citizens, while remaining committed to the nation's interests. Thus, it is urgent to integrate Civics (PPKn) holistically into the curriculum to prepare a golden generation that excels intellectually and imbues the Pancasila character.

Keywords: Global Citizenship Education, PPKn, Pancasila Character, Global Citizen, National Identity.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk karakter warga negara global yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi yang semakin intensif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber literatur relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPKn memiliki peran strategis sebagai instrumen fundamental dalam menyeimbangkan penguasaan kompetensi global dengan penguatan identitas nasional. Pembelajaran PPKn tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menanamkan kesadaran kritis terhadap isu-isu global seperti ketimpangan sosial, konflik, dan kerusakan lingkungan. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, menjadi fondasi etis dalam menyikapi tantangan global agar tidak kehilangan jati diri bangsa. PPKn mendorong terciptanya warga negara yang adaptif, toleran, dan solutif, namun tetap berpihak pada kepentingan bangsa. Dengan demikian, PPKn sangat urgen untuk diintegrasikan secara holistik dalam kurikulum guna mempersiapkan generasi emas yang unggul secara intelektual sekaligus berkarakter Pancasila.

Kata Kunci: Global Citizenship Education, PPKn, Karakter Pancasila, Warga Negara Global, Identitas Nasional.

Copyright (c) 2026 Eti Suliyawati, Andhika Lungguh Perceka

✉Corresponding author: Eti Suliyawati

Email Address: hsuliyawati@gmail.com (JL. Nusa Indah Nomor 24, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Jabar)

Received 12 July 2026, Accepted 18 July 2026, Published 24 July 2026

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mempersiapkan warga negara global yang berkarakter Pancasila di tengah arus globalisasi yang semakin intensif (Anugrah and Rahmat, 2024). Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, baik dalam lingkup nasional maupun global. Sebagai salah satu komponen dari warga negara bangsa, manusia harus mampu menempatkan posisinya pada tataran

kapan menjadi warga negara bangsa dan kapan menjadi warga negara global. Metode yang dapat digunakan agar warga negara bangsa menyadari hak-hak, peran, dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga negara global adalah melalui mata pelajaran PPKn . Dengan demikian, PPKn menjadi poros utama dalam menyiapkan warga negara global di era globalisasi.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah derasnya arus globalisasi yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (Mumu *et al.*, 2023). Globalisasi menghadirkan tantangan serius berupa krisis identitas nasional akibat percampuran budaya global dengan budaya lokal, yang didorong oleh percepatan digitalisasi dan perubahan sosial yang signifikan. Warga negara dihadapkan pada perkembangan zaman yang berjalan sangat cepat, sehingga diperlukan kompetensi untuk mengantisipasi berbagai masalah global atau isu-isu kewarganegaraan global yang kerap muncul dalam eskalasi yang tinggi . Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengantarkan warga negara ke dalam era keterbukaan informasi, yang memperkuat pentingnya penguatan kompetensi wawasan global warga negara dalam mendukung kewarganegaraan digital . Pengaruh budaya asing berdampak pada memudarnya rasa mencintai identitas nasional dan lunturnya nilai-nilai Pancasila jika tidak disikapi dengan tepat.

Meskipun berbagai kajian telah membahas peran PPKn dalam menghadapi globalisasi, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi (Mulyani *et al.*, 2024). Penelitian sebelumnya cenderung memisahkan pembahasan antara global citizenship education dengan penguatan karakter Pancasila, seolah-olah keduanya merupakan ranah yang berdiri sendiri. Padahal, dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki relevansi universal dengan nilai-nilai global citizenship seperti keadilan, kemanusiaan, penghormatan terhadap keberagaman, dan perdamaian. Penelitian tentang warga negara global di Indonesia seringkali belum secara mendalam mengintegrasikan dimensi karakter Pancasila sebagai fondasi etis dalam bersikap terhadap isu-isu global. Sementara itu, studi tentang penguatan karakter melalui PPKn masih banyak yang terfokus pada ranah nasional tanpa memperluas perspektif ke ranah global. Hal ini menciptakan ruang bagi penelitian yang mengkaji secara komprehensif bagaimana PPKn dapat menjadi jembatan antara tuntutan kompetensi global dan pelestarian identitas nasional yang berlandaskan Pancasila.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia yang tidak hanya unggul secara intelektual dalam kancah global, tetapi juga tetap berkarakter Pancasila. Di era disrupsi yang penuh dengan perubahan cepat dan transformasi sosial, pendidikan kewarganegaraan menjadi semakin relevan dan krusial dalam membentuk generasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang peran mereka dalam masyarakat dan negara . Pembelajaran PPKn secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melainkan juga membangun kesiapan warga negara untuk menjadi warga dunia . Sebagaimana ditegaskan dalam tujuan pendidikan kewarganegaraan, kompetensi wawasan global warga negara pada dasarnya menghendaki warga negara yang dapat bekerja dan memiliki aktivitas hidup sebagai warga negara yang baik dalam

tatanan kehidupan dunia, namun sekaligus menjaga dan memperdalam rasa identitas dan integritas dirinya sebagai bagian dari warga negara suatu negara . Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk merumuskan strategi integratif PPKn dalam menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati diri bangsa, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran kewarganegaraan yang adaptif dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam mengkaji urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mempersiapkan warga negara global yang berkarakter Pancasila. Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku teks pendidikan kewarganegaraan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen kebijakan pendidikan seperti kurikulum merdeka, peraturan perundang-undangan terkait pendidikan nasional, serta artikel ilmiah dan prosiding seminar yang membahas tentang global citizenship education dan karakter Pancasila. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti "global citizenship education", "PPKn", "karakter Pancasila", "pendidikan kewarganegaraan", dan "warga negara global". Sumber-sumber tersebut kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, aktualitas, dan kredibilitas untuk memastikan keakuratan data yang digunakan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai gagasan, konsep, serta temuan dari literatur yang dikaji untuk kemudian ditarik kesimpulan secara komprehensif mengenai peran strategis PPKn dalam membentuk warga negara global yang berkarakter Pancasila.

HASIL DAN DISKUSI

Konseptual PPKn dan Karakter Pancasila

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia merupakan mata pelajaran yang secara fundamental dirancang untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara konseptual, PPKn bukan sekadar mata pelajaran yang mentransfer pengetahuan kewarganegaraan, melainkan sebuah wahana edukatif yang mengemban misi strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral dan kepribadian bangsa kepada peserta didik sejak dini hingga jenjang pendidikan tinggi (Rusli *et al.*, 2025). Sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006, PPKn memfokuskan diri pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya .

Filosofi dasar yang menjadi fondasi PPKn adalah Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi bangsa Indonesia (Hardiyanto, Iriansyah and Saryono, 2024). Pancasila memiliki berbagai fungsi dan posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, hingga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa, tetapi juga merupakan jiwa dan kepribadian yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Oleh karena itu, PPKn diarahkan untuk menggali dan mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan yang memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan dan moralitas yang berakar pada Pancasila.

Tujuan utama PPKn secara konseptual dirumuskan sebagai upaya untuk menciptakan *good and smart citizen*, atau warga negara yang baik dan cerdas (Pangalila, 2017). Somantri (2001) mendefinisikan warga negara yang baik sebagai sosok yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, serta demokratis Pancasila sejati. Kecerdasan yang dimaksud meliputi kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, yang diiringi dengan rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, PPKn secara holistik menekankan pembinaan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara seimbang.

Karakter Pancasila yang menjadi muatan utama PPKn terwujud dalam pengamalan kelima sila secara terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari (Sasi *et al.*, 2025). Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, diimplementasikan melalui sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain serta mengembangkan toleransi antarumat beragama. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tercermin dalam perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta menolak segala bentuk perundungan dan tindakan kekerasan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, diwujudkan melalui kemampuan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, mengembangkan rasa cinta tanah air, dan bangga menjadi warga negara Indonesia (Januaris, 2016). Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, direalisasikan melalui pengutamaan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi perbedaan pendapat, saling menghargai pendapat orang lain, dan menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diterapkan melalui sikap adil dalam keluarga dan masyarakat, saling membantu dan tolong-menolong sesama, serta menghargai hak-hak orang lain.

Secara kurikuler, ruang lingkup PPKn mencakup delapan aspek utama, yakni Persatuan dan Kesatuan bangsa, Norma dan Peraturan, Hak Asasi Manusia, Kebutuhan Warga Negara, Konstitusi Negara, Kekuasaan dan Politik, Pancasila, serta Globalisasi (Wibowo and Wahono, 2017). Cakupan yang luas ini menunjukkan bahwa PPKn merupakan bidang kajian interdisipliner yang dijabarkan dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu negara, hukum, sejarah, ekonomi, moral, dan filsafat.

Integrasi ini memungkinkan PPKn menjadi mata pelajaran yang kaya akan nilai dan relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang majemuk.

Dalam praktik pembelajarannya, PPKn mengedepankan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan kognitif, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman belajar yang autentik (Fernanda, Fernica and Pratama, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan silabus PPKn berbasis proyek kewarganegaraan dinilai efektif dalam mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis masalah (PBL) juga diterapkan untuk menempatkan siswa sebagai agen aktif dalam memecahkan masalah nyata yang dihadapi masyarakat, sambil mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila.

Konsep karakter Pancasila dalam PPKn semakin diperkuat dengan hadirnya Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka (Selfi, 2023). Dimensi-dimensi seperti gotong royong, kemandirian, berpikir kritis, kreativitas, dan berakhlak mulia menjadi target pengembangan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran PPKn. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman guru terhadap filosofi Kurikulum Merdeka, kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek, serta keterbatasan sarana prasarana dan literasi digital. Kesenjangan antara ekspektasi kurikulum dan praktik di kelas masih menjadi isu yang perlu diatasi secara sistemik.

Pada tataran konseptual yang lebih tinggi, PPKn dirancang untuk menjawab tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati diri kebangsaan. Tujuan PPKn mencakup kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa PPKn tidak hanya membekali peserta didik dengan wawasan kebangsaan, tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari masyarakat global yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, PPKn menjadi pilar fundamental dalam upaya nation's character building yang berkelanjutan.

Diskursus Global Citizenship Education

Global Citizenship Education (GCED) atau Pendidikan Kewarganegaraan Global muncul sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan abad ke-21 yang tidak lagi mengenal batas-batas negara (Untari, Luthfi and Murtiningsih, 2024). Konsep ini didorong oleh agenda global, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Target 4.7, yang menekankan pentingnya membekali semua pembelajar dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta budaya perdamaian dan non-kekerasan. Amanat ini menegaskan bahwa pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan individu yang melek huruf dan berhitung, tetapi harus berperan sentral dalam membantu masyarakat membangun dunia yang lebih adil, damai, toleran, dan inklusif.

Secara fundamental, GCED bertujuan untuk memberdayakan peserta didik dari segala usia agar menjadi warga global yang aktif dan bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan rasa

hormat terhadap sesama, membangun rasa memiliki terhadap kemanusiaan bersama, dan mendorong kontribusi nyata dalam menyelesaikan tantangan global . Tantangan tersebut meliputi isu-isu krusial seperti perubahan iklim, konflik, kemiskinan, ketidaksetaraan, degradasi lingkungan, dan diskriminasi. GCED ingin membekali individu untuk tidak hanya memahami masalah, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bertindak dan bekerja sama dalam solidaritas demi masa depan yang lebih berkelanjutan dan damai .

Untuk mencapai tujuan tersebut, UNESCO merumuskan tiga dimensi utama dalam kerangka GCED, yaitu dimensi kognitif, sosio-emosional, dan perilaku (Dakhlan and Kuswandi, 2024). Dimensi kognitif berkaitan dengan perolehan pengetahuan dan pemahaman kritis tentang isu-isu global, regional, nasional, dan lokal, serta keterkaitan dan saling ketergantungan antarnegara dan populasi . Dimensi sosio-emosional menekankan pengembangan rasa memiliki terhadap kemanusiaan bersama, berbagi nilai dan tanggung jawab, empati, solidaritas, serta penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman. Dimensi perilaku mendorong peserta didik untuk bertindak secara efektif dan bertanggung jawab di tingkat lokal, nasional, dan global demi terciptanya dunia yang lebih damai dan berkelanjutan .

Meskipun memiliki kerangka yang jelas, implementasi GCED di berbagai negara menghadapi tantangan signifikan. Studi di kawasan ASEAN menunjukkan bahwa meskipun konsep GCED telah tercermin dalam kurikulum nasional, pemahaman guru tentangnya masih bervariasi dan seringkali rendah karena kurangnya pelatihan, beban kerja berlebih, dan alokasi anggaran pendidikan yang minim (Annas *et al.*, 2022). Singapura menjadi pengecualian dengan dukungan penuh dari sekolah dan pemerintah, namun di negara lain seperti Kamboja dan Thailand, latar belakang agama dan kemanusiaan yang kuat justru belum diimbangi dengan pemahaman pedagogis yang memadai . Secara global, data menunjukkan bahwa hanya 25% negara yang mengintegrasikan GCED secara penuh dalam pendidikan pra-jabatan guru, sehingga banyak guru tidak percaya diri untuk mengimplementasikannya dengan pendekatan yang responsif secara budaya.

Dalam diskursusnya, terdapat dua paradigma utama yang bersaing dalam pendidikan kewarganegaraan global (Kobandaha *et al.*, 2025). Paradigma pertama adalah GCED neoliberal, yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan kerja peserta didik agar siap menghadapi pasar tenaga kerja global . Pendekatan ini cenderung pragmatis dan berorientasi pada kepentingan ekonomi. Paradigma kedua adalah GCED transformatif, yang menekankan pentingnya pendekatan reflektif dan kritis dalam pembelajaran untuk menghindari risiko depolitisasi pendidikan kewarganegaraan . Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk mempertanyakan struktur kekuasaan, ketidakadilan, dan menjadi agen perubahan sosial yang nyata .

Tantangan lain yang muncul adalah dominasi epistemologi Barat dalam kerangka GCED, yang seringkali mengusung cita-cita demokrasi liberal . Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan dengan tradisi kewarganegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang mengedepankan nilai-nilai seperti Pancasila, gotong royong, pluralisme, dan agama sebagai dasar kehidupan berbangsa dan

bernegara . Oleh karena itu, lokalisasi menjadi kunci keberhasilan GCED, yaitu dengan memadukan kerangka kerja global dengan kearifan lokal, konteks budaya, dan nilai-nilai kebangsaan yang dianut oleh suatu negara . Contohnya, upaya mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti Pancawaluya (Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer) dalam implementasi GCED di Jawa Barat, Indonesia .

Di Indonesia, diskursus ini sangat relevan dengan peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn memiliki urgensi strategis dalam mempersiapkan warga negara global yang berkarakter Pancasila . Mata pelajaran ini tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menanamkan kesadaran kritis terhadap isu-isu global . Nilai-nilai Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, menjadi fondasi etis dalam menyikapi tantangan global agar tidak kehilangan jati diri bangsa . PPKn mendorong terciptanya warga negara yang adaptif, toleran, dan solutif, namun tetap berpihak pada kepentingan bangsa .

Berbagai upaya konkret telah dilakukan untuk memperkuat GCED di Indonesia, salah satunya melalui pelatihan bagi kepala sekolah dan guru. Contohnya, kolaborasi antara Program Studi PPKn UPI dan PGRI Jawa Barat yang menyelenggarakan pelatihan GCED bagi 90 peserta dari berbagai SMA/SMK . Pelatihan ini tidak hanya memberikan penguatan materi tentang tantangan kewarganegaraan global, tetapi juga memperkenalkan strategi pembelajaran partisipatif dan pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal . Guru diperkenalkan pada modul digital "Menjadi Warga Dunia Berkarakter Pancawaluya" yang dirancang untuk diterapkan melalui pendekatan blended learning, mengajak siswa berdiskusi mengenai isu global, melakukan refleksi moral, menyusun aksi sosial, dan menampilkan karya bertema "Dari Tatar Sunda untuk Dunia" .

Program pertukaran budaya juga menjadi wahana efektif untuk mengimplementasikan GCED. Korea-Indonesia Cultural Exchange Showcase 2026 yang melibatkan mahasiswa PPKn UPI dan Honam University, Korea Selatan, menjadi contoh nyata . Melalui pertunjukan budaya seperti K-Pop Cover Dance, Taekwondo, Samulnori, Angklung, dan tari tradisional, peserta tidak hanya menikmati seni tetapi juga memperoleh pemahaman tentang nilai, tradisi, dan identitas budaya kedua negara. Momen bermain angklung bersama secara kolaboratif menjadi pengalaman autentik dalam mengembangkan kompetensi global seperti komunikasi lintas budaya, menghargai keberagaman, dan membangun sikap saling menghormati . Kegiatan ini membuktikan bahwa musik dan seni dapat menjadi bahasa universal yang mempererat hubungan antarbangsa sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai GCED.

Diskursus GCED ke depan menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan global bukanlah mata pelajaran berdiri sendiri, melainkan kerangka untuk mentransformasi seluruh sistem pendidikan . Hal ini membutuhkan kebijakan yang koheren, dukungan kepemimpinan, keterlibatan masyarakat, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat . Guru harus didukung, dipercaya, dan dihargai sebagai agen transformasi nilai, bukan sekadar penyampai materi kurikulum . Selain itu, pendidikan harus memecah sekat-sekat disiplin ilmu yang kaku agar dapat mencerminkan kompleksitas dunia nyata dan

mendorong pembelajaran yang holistik dan terintegrasi . Dengan pendekatan ini, GCED dapat menjadi solusi praktis untuk membangun kembali kepercayaan dan rasa memiliki di dunia yang semakin terfragmentasi.

Urgensi PPKn Dalam Mempersiapkan Warga Negara Global yang Berkarakter Pancasila

Globalisasi telah menghadirkan tatanan dunia baru yang ditandai dengan keterbukaan informasi, modernisasi, dan percepatan perubahan sosial yang masif (Maiwan, 2014). Arus global yang tidak terbendung ini membawa pengaruh besar terhadap pola pikir, perilaku, dan nilai-nilai masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga mengancam kelunturan jati diri dan karakter bangsa Indonesia . Di tengah derasnya penetrasi budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai luhur bangsa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) muncul sebagai instrumen strategis yang memiliki urgensi tinggi dalam mempersiapkan warga negara global yang tetap berkarakter Pancasila. Berikut bangunan konseptual hasil penelitian.

Bangunan Konseptual Hasil Penelitian

Urgensi PPKn dalam Membentuk Warga Negara Global



PPKn memiliki peranan yang fundamental dalam membentuk karakter generasi muda melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman . Sebagai mata pelajaran yang wajib di semua jenjang pendidikan, PPKn tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga menanamkan prinsip demokrasi, semangat kebangsaan, dan ikut serta dalam pembinaan karakter bangsa melalui *school civic education* dan *community civic education*. Dalam konteks global, PPKn mengembangkan kompetensi warga negara yang mampu "act locally and think globally", yaitu melestarikan nilai-nilai ke-Indonesiaan dengan cara pandang internasional .

Urgensi PPKn semakin terasa ketika dihadapkan pada tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, konflik budaya, dan isu hak asasi manusia yang membutuhkan keterlibatan aktif

warga negara . PPKn membekali peserta didik dengan kesadaran kritis terhadap isu-isu global sekaligus memberikan fondasi etis berupa nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi berbagai tantangan tersebut . Nilai-nilai Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, menjadi tameng terhadap pengaruh negatif globalisasi dan mencegah terjadinya degradasi nasionalisme di kalangan generasi muda .

Penelitian menunjukkan bahwa PPKn secara signifikan berperan dalam membentuk karakter siswa melalui prinsip-prinsip Pancasila sekaligus meningkatkan kesadaran global mereka . Dengan mengadopsi metode pembelajaran yang inovatif dan kontekstual, PPKn mampu menghasilkan generasi yang berintegritas, berkarakter kuat, dan memiliki kapabilitas untuk berkontribusi di tingkat internasional. Integrasi perspektif lokal dan global dalam PPKn mendukung terciptanya identitas nasional yang adaptif terhadap tuntutan modern, sekaligus menjawab kebutuhan akan warga negara yang cerdas, kritis, demokratis, dan berkarakter.

Namun, implementasi PPKn di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman guru terhadap pendekatan pembelajaran yang inovatif serta kesenjangan antara ekspektasi kurikulum dan praktik di kelas. Revitalisasi kurikulum dan metode pembelajaran PPKn yang adaptif dan kontekstual menjadi kebutuhan mendesak agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar budaya bangsa . Kolaborasi antara pendidikan formal, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara berkelanjutan dan menciptakan sinergi dalam pembentukan karakter anak bangsa .

Pada tataran konseptual, PPKn dirancang untuk menjawab kebutuhan akan warga negara yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab global. Konsep kewarganegaraan kini tidak lagi terbatas pada konteks konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kewarganegaraan global dan digital yang menuntut generasi muda memiliki kompetensi literasi digital, kesadaran global, serta tanggung jawab sosial . Menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan sinergi antara penguasaan teknologi, karakter kebangsaan, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) .

Dengan demikian, PPKn memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam mempersiapkan warga negara global yang berkarakter Pancasila. Melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, tanggung jawab sosial, serta partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, PPKn menjadi benteng pertahanan terhadap pengaruh negatif globalisasi . PPKn tidak hanya menciptakan warga negara yang baik dan cerdas secara nasional, tetapi juga warga dunia yang bertanggung jawab, adaptif, dan tetap berpegang teguh pada jati diri bangsa Indonesia . Keberhasilan PPKn dalam menjalankan misi strategis ini akan menentukan kualitas generasi emas Indonesia yang mampu bersaing di kancah global tanpa kehilangan akar budaya dan nilai-nilai luhur Pancasila.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Global Citizenship Education (GCED) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki keterkaitan yang erat dan saling memperkuat dalam mempersiapkan warga negara global yang berkarakter Pancasila. PPKn memiliki urgensi strategis sebagai instrumen fundamental dalam menyeimbangkan tuntutan kompetensi global dengan penguatan identitas nasional. Di tengah arus globalisasi yang semakin intensif, PPKn tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi etis dalam menyikapi berbagai isu global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan konflik budaya. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, menjadi tameng penguatan karakter bangsa sekaligus panduan dalam berperan aktif sebagai warga dunia yang bertanggung jawab. Integrasi perspektif global dan lokal dalam PPKn mendukung terciptanya generasi emas yang adaptif, toleran, dan solutif, namun tetap berpihak pada kepentingan bangsa. Revitalisasi kurikulum dan metode pembelajaran PPKn yang inovatif dan kontekstual menjadi kebutuhan mendesak agar mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, PPKn merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul secara intelektual dan berkarakter Pancasila, sekaligus menjadi benteng pertahanan terhadap pengaruh negatif globalisasi. Keberhasilan implementasi PPKn akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa yang siap bersaing di kancah global tanpa kehilangan jati diri kebangsaan.

REFERENSI

- Annas, A.N. *et al.* (2022) 'Program Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Boarding (Studi Multikasus di MA Al-Huda Gorontalo)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), pp. 15896–15903.
- Anugrah, A. and Rahmat, R. (2024) 'Pendidikan karakter dalam perspektif kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(1), pp. 22–34.
- Dakhalan, A.M. and Kuswandi, D. (2024) 'Pendidikan kewarganegaraan global (GCE)', *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 4(2), pp. 158–171.
- Fernanda, S.A., Fernica, V.O. and Pratama, M.B. (2025) 'Penerapan Evaluasi Autentik Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Di Tingkat Sekolah Dasar', *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), pp. 334–340.
- Hardiyanto, L., Iriansyah, H.S. and Saryono, S. (2024) 'Landasan filosofis pendidikan budaya dan karakter bangsa', *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), pp. 733–741.
- Januaris, Y. (2016) 'ANALISIS WUJUD PENGAMALAN SILA PERSATUAN INDONESIA DALAM PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI KELAS X SMA NEGERI 1 SUNGAI-LAUR KABUPATEN KETAPANG'.
- Kobandaha, F. *et al.* (2025) 'Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Artificial Intelligences di Era

- Digital Sebuah Tinjauan Literatur', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), pp. 576–582.
- Maiwan, M. (2014) 'Memahami Politik Globalisasi Dan Pengaruhnya Dalam Tata Dunia Baru: Antara Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 7(1).
- Mulyani, H. *et al.* (2024) 'Transformasi pendidikan kewarganegaraan global di era abad 21: Analisis implementasi dan tantangan', *Jurnal Kewarganegaraan*, 21(1), p. 88.
- Mumu, M. *et al.* (2023) 'Kajian Riset tentang Kemampuan Bangsa dalam Merespon Globalisasi', *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), pp. 10811–10818.
- Pangalila, T. (2017) 'Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), pp. 91–103.
- Rusli, T.S. *et al.* (2025) *Konsep Dasar PKN: Menjadi Warga Negara Cerdas dan Berkarakter*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sasi, F.X. *et al.* (2025) 'Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter di sekolah dasar', *Educatum: Jurnal Dunia Pendidikan*, 2(2), pp. 153–166.
- Selfi, P. (2023) 'Profil Pelajar Pancasila Sebagai Karakter Dasar Peserta Didik Dalam Era Society 5.0 Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila'. Uin Raden Intan Lampung.
- Untari, A.D., Luthfi, Z.F. and Murtiningsih, I. (2024) 'Membangun wawasan global warga negara muda melalui pendidikan kewarganegaraan global di Indonesia', *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 7(2), pp. 170–187.
- Wibowo, A.P. and Wahono, M. (2017) 'Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), pp. 196–205.